

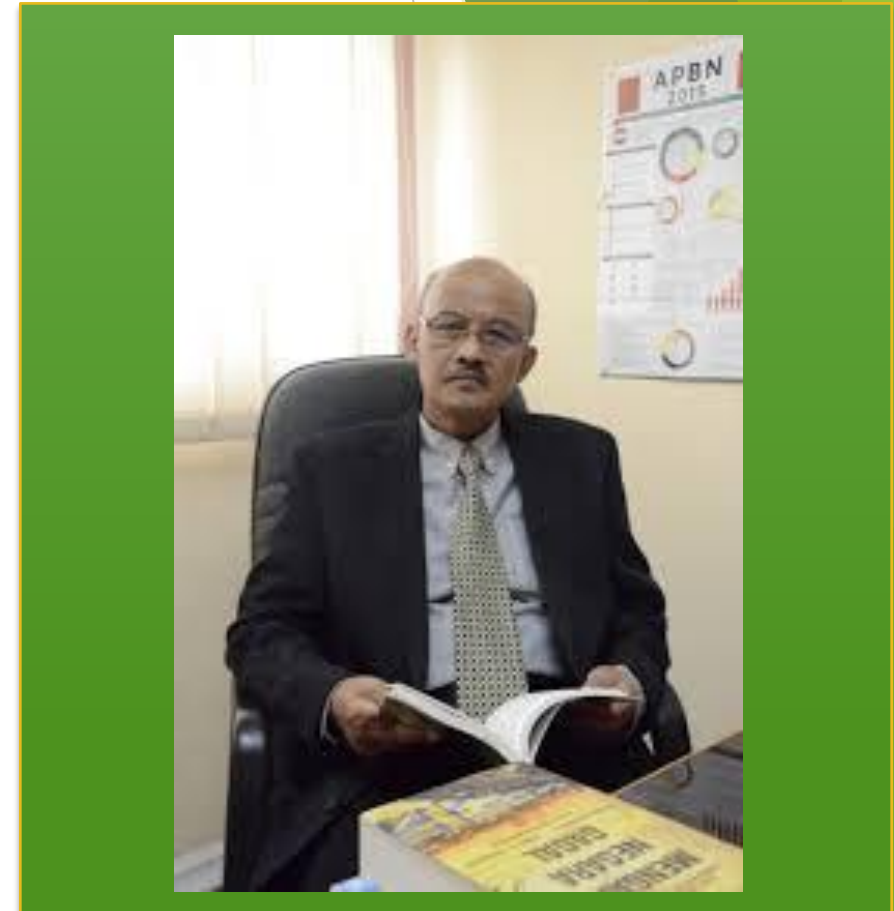


**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

GERAKAN SOSIAL

Sub Materi: Perubahan Sosial

Dosen Pengampu : DR. SIGIT ROCHADI
KAMARUDDIN SALIM



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

Pokok Bahasan

- ▶ Pengertian perubahan sosial
- ▶ Bentuk-bentuk perubahan sosial
- ▶ Evolusi dan revolusi

Tujuan Perkuliahan

- ▶ Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun sendiri konsep perubahan sosial misalnya Evolusi dan Revolusi

KULIAH PERTAMA: PERUBAHAN SOSIAL

Dalam kaitannya dengan gerakan sosial, perlu dikemukakan bentuk-bentuk perubahan sosial yang dekat dengan gerakan sosial, seperti perlawanan, pemberontakan dan revolusi. Di bawah ini dikemukakan dua bentuk perubahan sosial yang paling umum, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi merupakan perubahan sosial yang berjalan perlahan-lahan dari masyarakat yang strukturnya sederhana ke masyarakat yang strukturnya kompleks. Prosesnya berlangsung secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Akar dari teori ini dapat ditemukan pada sosiologi Aguste Comte, Ferdinand Tonnies dan ahli biologi Charles Darwin. Jenis perubahan sosial seperti ini telah diterima sebagai suatu kebenaran sejak permulaan abad XIX hingga abad XXI. Hal demikian tidak terlepas dari terus meningkatnya kesejahteraan masyarakat termasuk petani dan buruh. Industrialisasi yang banyak dinikmati oleh kaum buruh dan tani, telah menjadikan dua kekuatan ini bukan lagi menjadi tumpuan revolusi. Faktor lain adalah adanya trauma dari sebagian besar masyarakat terhadap perubahan cepat dan mendasar, seperti perang dan revolusi. Baik kelompok yang diuntungkan maupun kelompok yang dirugikan, tidak menginginkan kembali revolusi sebagai jalan perubahan sosial. Seperti ditunjukkan oleh Barington Moore, “revolusi di manapun selalu disertai penindasan dan penghancuran nilai-nilai kemanusiaan” (Wertheim, 1999). Trauma akan peristiwa tersebut telah mendorong menguatnya evolusi sebagai jenis perubahan sosial. Sejak mengemukanya evolusi dan modernisasi, perubahan secara perlahan dan bertahap ke suatu bentuk peradaban, menjadi satu-satunya pilihan.

Perubahan evolusioner menandai masyarakat yang tenang dan tertib. Tetapi ketenangan dan ketertiban itu dapat berasal dari beberapa sumber. Ketertiban yang berasal dari masyarakat dimungkinkan jika ada kebebasan menyatakan pendapat, berorganisasi dan penegakan hukum. Kondisi demikian akan memberikan dinamika perubahan dalam masyarakat. Melalui dialektika gagasan yang diproduksi oleh berbagai kelompok, akan dapat ditemukan arah perubahan, metode perubahan, derajat perubahan dan cakupan perubahan. Menurut Morgan, sumber utama perubahan secara evolusi adalah teknologi atau penemuan teknologi (dikutip dari Wertheim, 1999). Lenner (1988) lebih menekankan komunikasi atau konsumsi informasi yang selanjutnya akan menimbulkan mobilitas psikis. Melalui risetnya di sejumlah negara Timur Tengah, Lenner menemukan bahwa sejumlah desa yang kurang bersentuhan dengan komunikasi atau informasi, inovasinya dan proses adopsi inovasi sangat lambat. Rata-rata anggota masyarakat takut mengemukakan gagasan, bahkan untuk hal yang paling menyentuh harga dirinya. Dengan memandang involusi sebagai

perubahan yang kecepatannya sama dengan evolusi, Geertz (1983) menekankan pentingnya penduduk (populasi) sebagai penentu perubahan. Menurut Geertz, involusi di pedesaan Jawa terjadi sebagai hasil dari penambahan penduduk yang terus meningkat, konsentrasi penduduk pada pekerjaan sawah dan kewajiban dari sistem sosial pedesaan untuk terus mempekerjakan setiap penambahan penduduk pada pekerjaan sawah.

Berbeda dengan teoritis di atas, Andrain (1992) menyebut tiga sumber perubahan, yaitu ideologi atau keyakinan, organisasi dan penemuan teknologi. Baik inovasi teknologi maupun komunikasi memerlukan kebebasan menyatakan pendapat. Dalam kondisi represif, kecil kemungkinan tumbuhnya inovasi, sebab inovasi seringkali dipandang sebagai bentuk penyimpangan bahkan perlawanan terhadap kemapanan. Dalam pemerintahan represif, hal demikian akan segera dilawan oleh aparat keamanan. Supaya perubahan sosial terjadi, orang harus diyakinkan bahwa hal itu mungkin dan diinginkan. Di sini pentingnya ideologi yang menentukan kelayakan dan kebaikan dari perubahan-perubahan tersebut. Berdasarkan suatu keyakinan, orang menafsirkan masa lalu, memberi makna pada masa sekarang dan mendeskripsikan masa depan yang ideal. Keyakinan tersebut juga memotivasi orang untuk bekerjasama melakukan perubahan dan menentang status quo. Ideologi baru mempunyai tugas memberi harapan akan masa depan yang lebih baik dengan menunjukkan tujuan-tujuan baru dan memberi masyarakat perasaan untuk bergerak.

Aspek politik lainnya dari perubahan adalah organisasi. Andrain menyatakan bahwa organisasi dibutuhkan untuk memaksa, baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam organisasi dibutuhkan untuk mendisiplinkan gerakan dan perubahan, sedangkan ke luar berfungsi menekan kelompok lain atau melakukan negosiasi dan kooperasi. Di sini organisasi memberikan arah dan moral gerakan.

Penemuan-penemuan teknologi merupakan sumber perubahan yang bersifat non politis. Revolusi Industri yang berawal di Inggris meningkatkan aspirasi masyarakat akan perubahan. Industrialisasi yang berlangsung di Negara-Negara Berkembang segera setelah perang dunia II, membawa perubahan sangat mendasar. Perubahan paling mencolok dapat dilihat pada mobilitas penduduk dari desa ke kota, peningkatan pendapatan para pemilik kapital, meningkatnya jumlah buruh dan sebagainya. Penggunaan teknologi pertanian di pedesaan Jawa telah memperkenalkan ekonomi uang (moneytisasi) pada masyarakat, mengubah hubungan-hubungan sosial, seperti sistem keluarga, agama dan kegiatan politik. Peranan teknologi dalam perubahan sosial ini diakui oleh para teoritis, terutama para pengikut teori

modernisasi. Sebuah buku klasik yang diedit Myron Weiner (1983) menunjukkan hal ini. Modernisasi politik, birokrasi, pendidikan, hukum, manusia dan sebagainya, tidak bisa melepaskan diri dari peranan teknologi.

Perubahan evolusioner dapat juga dilakukan oleh negara. Pendapat ini mengemuka di antara para penganut teori Negara organis yang berakar pada Hegel. Di sini negara tidak dipandang sebagai arena di mana kekuatan-kekuatan sosial saling menekan untuk memperoleh hasil yang optimal seperti pemikiran kaum pluralis. Negara mempunyai kepentingannya sendiri yang didominasi oleh elite dan birokrasinya. Dalam pandangan Hegel (dikutip dari Aiken, 2002), tujuan dari gerak sejarah adalah pembentukan masyarakat manusia yang sempurna. Sejarah merupakan interaksi antara ide universal dengan kenyataan sehari-hari. Dengan demikian, apa yang ada sekarang bukanlah kenyataan yang final, tetapi suatu proses menuju kenyataan ideal. Negara merupakan penjelmaan dari ide yang universal, memperjuangkan kepentingan yang lebih besar dan karena itu harus dipatuhi. Di era modern, pemikiran Hegel dan para pilosof lainnya yang menghendaki negara kuat, muncul kembali dalam teori Negara organis. Salah satu tokohnya adalah Alfred Stepan. Dia menyatakan bahwa Negara merupakan sebuah lembaga yang memiliki tujuan dan mengejar kepentingannya sendiri. Atas dasar ini Negara bukanlah lembaga yang pasif, tetapi secara aktif mencampuri urusan masyarakat.

Negara Orde Baru adalah Negara yang aktif mencampuri urusan masyarakat. Negara secara aktif mengusahakan sumberdaya melalui ekonomi Negara, mencegah partisipasi masyarakat secara luas, membatasi media massa, mengontrol partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan, mengendalikan birokrasi sipil dan militer. Hal itu dilakukan karena Negara mendefinisikan dirinya mengemban tugas melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun mental. Keberhasilan pelaksanaan tugas itu hanya dimungkinkan, jika terdapat stabilitas sosial dan politik. Perubahan sosial secara terencana dilakukan di bawah kendali Negara. Secara aktif Negara melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Kemajuan secara berarti dicapai Indonesia, baik secara ekonomi maupun industri. Salah satu teori yang berusaha menjelaskan gejala tersebut adalah teori Negara otoriter birokratis. Teori ini mula-mula dikemukakan oleh O'Donnell yang menghubungkan bentuk rejim dan pembangunan ekonomi. Sifat represif atau otoriter negara muncul ketika pembangunan ekonomi beralih ke strategi substitusi impor yang memerlukan akses ke pasar internasional, teknologi yang maju dan investasi. Otoriterianisme Negara diperlukan untuk memperoleh ketiga hal tersebut.

Meskipun terdapat ketenangan dan perubahan evolusioner berjalan dari atas, gerakan sosial dalam konteks seperti itu tidak tumbuh subur. Adanya kontrol dari negara terhadap masyarakat dan tindakan keras dari negara terhadap aktivis, mengurangi keberanian masyarakat untuk membangun sebuah gerakan baik untuk memulai suatu perubahan atau sekedar reaksi terhadap perubahan. Negara Orde Baru benar-benar otonom dalam arti mampu merumuskan kehendaknya dan mencapainya sesuai yang mereka targetkan tanpa halangan berarti dari masyarakat. Negara seperti itu tidak memberikan toleransi kepada rakyatnya untuk melakukan perubahan di luar format yang didesain oleh negara. Kritik, tuntutan apalagi tantangan dan penolakan terhadap desain negara akan menghadapi tekanan keras dari Negara mulai dari tuduhan ekstrim kiri, kanan, anggota PKI, anti pembangunan dan subversif. Kenyataannya, tuduhan sebagai anggota atau simpatisan PKI telah membuat takut rakyat perdesaan, sehingga pemerintah dengan mudah memobilisasi mereka. Ketakutan itu berhubungan dengan masa depan diri dan anggota keluarganya. Sejak kekerasan 1965, tidak ada kritik atau tantangan yang berarti terhadap pemerintah karena ketakutan seperti itu. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan oleh para aktivis gerakan sosial, kebanyakan mengambil bentuk kerjasama tingkat tinggi yang akomodatif terhadap struktur Negara. Jika ada yang berusaha melakukan perubahan, lebih pada pendidikan dan penyadaran hak-hak warga Negara dan bukan menyemai ideologi untuk diwadahi oleh gerakan untuk membangun sistem sosial politik alternatif. Di bawah negara otoriter birokratik, usaha untuk mengorganisasi masyarakat yang dimaksud untuk menentang kekuasaan, itu sangat tidak mungkin.

Di bawah UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, semua organisasi harus terdaftar di Depdagri. Jika ingin melakukan aktivitas seperti menyelenggarakan musyawarah atau kongres, harus ada ijin dari Depdagri. Keresahan masyarakat di bawah sistem seperti itu sangat kentara. Di perdesaan protes diwujudkan dalam bentuk pemilihan kotak kosong dalam pemilihan kepala desa. Meskipun calonnya hanya satu, masyarakat menolak dengan memasukan pilihannya kepada kotak kosong. Selain itu, pembangkangan terselubung merupakan bentuk yang lazim dan merupakan pilihan rasional para petani di tengah sistem yang hegemonic. Di kota-kota, protes sosial yang sifatnya temporer, memang muncul sejak awal tahun 1990-an, khususnya para buruh yang menuntut pembayaran Upah Minimum Regional atau Provinsi. Protes ini pun sesungguhnya lebih normatif dalam arti menuntut hak para buruh dan bukannya perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Salah satu kritik tajam yang dialamatkan pada jenis perubahan seperti ini adalah bentuk unilinear dan arah perubahan yang seragam. Hal ini akan membentuk warna dunia yang tunggal atau homogen dan tidak memberikan alternatif lain. Jika situasi demikian dibiarkan terus, maka kelompok yang secara materi dan teknologi unggul akan menentukan jalannya perubahan. Memang, semua kelompok dalam masyarakat menikmati hasil perubahan. Buruh menjadi lebih makmur dibanding periode sebelumnya, petani menikmati hasil produksi yang lebih baik, kerah putih makin megarahkan cita-citanya untuk menjadi kelas menengah baru dan para pemilik kapital berkonsentrasi untuk memperluas jaringan bisnisnya ke berbagai negara. Arah perubahan yang seragam seperti itu terjadi akibat dominasi positivisme dalam ilmu sosial. Tesis baru kemenangan modernisasi dengan globalisasi dan apa yang dikumandangkan oleh Fukuyama sebagai kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal yang menunjukkan arah tunggal perubahan sosial itu. Marx menyebut masyarakat seperti itu dihinggapi ideologi, di mana struktur dominasi direproduksi secara terus menerus melalui kesadaran palsu. George Lukacs pengikut Marx berusaha merumuskan suatu historisisme melalui abstraksi dan menyebut sistem yang melakukan generalisasi sebagai reifikasi, di mana kebenaran dikonstruksi secara terus menerus oleh elite ekonomi dan politik melalui kekuasaan ekonomi dan politik mereka. Herbert Marcuse sejalan dengan Marx dan Lukacs dengan menyebut masyarakat yang dikuasai ilmu positivisme dan teknologi serta mengabdikan hidupnya kepada hal-hal tersebut sebagai manusia satu dimensi. Akibatnya orang didorong untuk berpikir bahwa satu-satunya perubahan adalah arah dan tujuan tunggal yang telah ditentukan, demikian pula cara-cara untuk mencapai tujuan.

Bangunan di atas memperoleh kritik tajam dari teori kritis. Teori ini berargumen bahwa perubahan sosial dimulai dari kehidupan sehari-hari, seperti seksualitas, peranan keluarga dan di tempat kerja. Teori ini menolak determinisme dan mendukung voluntarisme. Akar penindasan manusia modern adalah struktur yang terus dipertahankan. Pada level ini, kemajuan tidak semata-mata terletak pada pengorbanan individu kepada struktur yang telah ada yang menentukan jalannya perubahan, tetapi manusia itu sendiri secara individual bertanggung jawab atas kebebasan mereka sendiri serta mencegah mereka agar tidak menindas sesamanya atas nama masa depan. Gagasan yang dipelopori mazhab Frankfurt ini menjadi pijakan filosofis kelahiran aliran multikulturalisme. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks perubahanevolusi dapat muncul gerakan sosial baik yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan maupun reaksi terhadap perubahan. Tetapi jika perubahan evolutif tersebut dikendalikan Negara dengan format Negara kuat, Negara otoriter

atau Negara organik, maka gerakan sosial bergerak secara diam-diam, tidak muncul ke permukaan. Terdapat pula suatu pola kerjasama tingkat tinggi antara aktivis gerakan sosial dengan pemerintah, terutama untuk pemberdayaan kelompok yang tertinggal dalam pembangunan.

Revolusi merupakan bentuk perubahan sosial lainnya. Suatu revolusi selalu bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan masyarakat atau susunan kekuasaan yang bercokol (Wertheim, 1999). Kehendak untuk melakukan perubahan secara mendasar inilah yang membedakan revolusi dengan bentuk perubahan sosial lainnya. Ciri khas konsep revolusi yang terus bertahan pada abad XX seperti yang dikemukakan oleh Eisenstadt (1986) adalah perubahan mendasar, diskontinuitas dan pembaharuan menyeluruh. Ketiga unsur tersebut ditemukan pada semua kajian yang dibahas oleh Eisenstadt, terutama karya-karya besar dari Charmers Johnson, Charles Tilly, Rittberger, James C. Davis dan Carl Friedrich.

Sejumlah riset tentang revolusi yang berlangsung sebelum tahun 1990-an, berangkat dari tiga asumsi utama. Pertama, kajian revolusi berangkat dari teori-teori psikologi yang mencoba menjelaskan revolusi berkaitan dengan motivasi rakyat untuk terlibat dalam gerakan. Pendekatan ini termasuk dalam gerakan sosial klasik yang dikemukakan di atas. Fokus utama pendekatan psikologi seperti diwakili oleh Robert Gurr (1970) dan A. Oberschall (1969) adalah identifikasi tahap-tahap atau prakondisi ketidakpuasan yang mengarah pada gerakan revolusi. Kedua, adalah yang menelaah krisis rejim-rejim dan perang dalam negeri. Studi tentang krisis rejim kebanyakan menyangkut identifikasi kondisi structural yang menunjukkan kontradiksi yang inheren dalam suatu rejim, terutama rejim kapitalis. Revolusi di Prancis, Rusia dan China menurut Skocpol disebabkan karena perkembangan kapitalis internasional dan pembentukan negara bangsa berskala dunia. Berbagai revolusi yang berlangsung di Dunia Ketiga seperti revolusi Islam di Iran dan revolusi damai di Filipina, berawal dari krisis ekonomi kapitalis. Sedangkan studi tentang perang dalam negeri terutama membahas tentang kondisi kelembagaan yang mempermudah terjadinya perang saudara. Lembaga yang semula memiliki kemampuan menyangga dan mewartakan aspirasi dan aktivitas berbagai kelompok kepentingan, tiba-tiba merosot perannya dan legitimasinya. Perang antar suku di sejumlah Negara Afrika, perang antar suku di Kalimantan dan antar agama di Ambon dapat disebut sebagai contoh. Ketiga, prakondisi yang ruang lingkupnya lebih luas seperti pembusukan politik dari suatu rejim dan ketidakmampuannya mengatasi masalah-masalah internal dan eksternal seperti yang ditunjukkan oleh Huntington (1968) bahwa munculnya elite-elite baru atau elite tandingan

yang ingin mengambil alih kekuasaan, serta dislokasi dan perubahan strata yang lebih besar yaitu munculnya strata baru dan dampaknya bagi kelompok-kelompok dalam proses politik.

Apabila dibuat deskripsi singkat mengenai penyebab revolusi dari kajian sebelumnya, ditemukan beberapa faktor demikian pula pemicunya. Marx adalah pelopor dalam analisis kelas dan menyatakan bahwa revolusi rakyat adalah produk kesengsaran yang terus menajam. Penghisapan dan eksploitasi kelas pekerja akan membangunkan kekuatan kelas ini untuk melakukan perlawanan kepada kelas borjuis. Pemikiran sebaliknya dikemukakan oleh De Tocqueville, bahwa revolusi itu produk dari kesejahteraan rakyat. Gagasan yang sama dikemukakan oleh Brinton, bahwa di mana revolusi itu terjadi, periode sebelumnya secara ekonomi rakyat makmur. Dari dua ekstrem posisi gagasan itu, terdapat James C. Davis yang menyatakan “revolusi tidak terjadi dalam keadaan kebutuhan ekstrem, melainkan lebih banyak dalam situasi tatkala suatu periode perbaikan dan harapan-harapan meningkat disusul oleh suatu kemunduran jangka pendek yang dalam prosesnya membawa frustrasi-frustrasi yang gawat”.

Kondisi ekonomi saja belum cukup menjelaskan sebab terjadinya revolusi. Seperti ditunjukkan di atas, bila kurva itu benar-benar merupakan suatu petunjuk, maka pertengahan tahun 1980-an mestinya terjadi revolusi di Indonesia. Sebab pada periode itu berlangsung penurunan yang cukup drastis dalam bidang ekonomi setelah selama 15 tahun menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di samping faktor ekonomi, masalah emansipasi – suatu istilah yang oleh Wertheim digunakan untuk menunjuk usaha-usaha secara kolektif atau individual untuk memperbaiki status mereka dalam hirarki sosial, juga didorong oleh faktor sosial dan politik. Mengikuti kurva yang dibuat oleh Davies, maka macetnya saluran mobilitas akan menimbulkan ketegangan atau ketidakpuasan. Wertheim membedakan dua jenis revolusi dalam hubungannya dengan mobilitas sosial ini. Peningkatan mobilitas vertikal merupakan ciri khas revolusi borjuis. Seperti yang berlangsung di Indonesia tahun 1945 yang harapannya meningkat tajam sejak Belanda diduduki Jerman tahun 1940. Kaum borjuasi nasional segera membayangkan posisi social yang lebih tinggi yang akan mereka duduki kelak. Harapan itu bertambah tinggi, ketika Indonesia diduduki Jepang yang menjanjikan kemerdekaan. Ketika revolusi pecah pada tahun 1945, kaum borjuasi merasa khawatir akan kembalinya Belanda. Jarak antara kekhawatiran dan harapan ini menurut Wertheim merupakan jarak yang tidak tertahankan lagi dan merupakan momen revolusi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan peningkatan mobilitas horizontal bagi massa perdesaan sebagai syarat revolusi tani. Menurut Wertheim, hal ini terutama bukan perubahan situasi ekonomi dan

sosial, melainkan lebih karena tumbuhnya kesadaran di kalangan petani miskin yang semakin besar jumlahnya yang dibangkitkan oleh pengaruh kekuatan ekonomi eksternal akan posisi kelas mereka yang rendah, sehingga mereka semakin menyusun diri sebagai class for itself.

Dari perspektif politik, penyebab pada umumnya adalah sistem politik otoriter dan tirani. Pecahnya revolusi biasanya tidak terjadi pada titik puncak penindasan, melainkan justru dalam suatu situasi di mana represi itu agak mereda. Ketika pemerintahan otoriter mengendurkan represinya dan mencoba suatu politik yang sedikit demokrasi, maka biasanya rejim otoriter tidak mampu lagi mengendalikan perubahan. Hipotesis tersebut disederhanakan dari teori Huntington. Menurut ahli politik ini, timbulnya revolusi itu berhubungan erat dengan konteks struktur politik. Dalam sistem politik yang otoriter dan tiranik, secara jelas telah memisahkan rakyat dari proses politik dan di manapun sistem itu berlangsung, akan terus ditentang oleh rakyat.

Revolusi itu sendiri hanya akan berlangsung jika dipenuhi dua syarat. Pertama, di mana lembaga-lembaga politik tidak mampu menyalurkan atau memberi kesempatan pada golongan-golongan baru untuk berpartisipasi dalam politik dan kepada elite baru untuk ikut serta dalam pemerintahan. Kedua, ada keinginan pada kekuatan-kekuatan sosial untuk berpartisipasi dan untuk mendapatkan keuntungan simbolik atau material. Kedua faktor tersebut kuncinya pada kemampuan suatu lembaga untuk menyalurkan partisipasi masyarakat yang terus meningkat. Huntington berasumsi bahwa pembangunan akan terus meningkatkan harapan masyarakat selain melahirkan elite-elite atau kelas menengah baru.

Institusi- institusi politik harus mampu menampung harapan dan partisipasi ini. Jika tidak, maka muncullah ledakan partisipasi yang antara lain berupa revolusi. Untuk Negara-negara Berkembang yang baru memulai pembangunan sejak tahun 1950-an, kemungkinan timbulnya revolusi tergantung pada kekuatan-kekuatan kelas menengah kota, kaum intelektual, borjuasi dan kaum tani. Jika golongan-golongan ini terasing dari tatanan sosial yang dibangun oleh rejim dan mereka dapat membangun kekuatan bersama, maka revolusi akan meledak.

Namun berbagai peristiwa pergantian rejim politik yang dapat digolongkan revolusi, seperti jatuhnya Marcos di Filipina, jatuhnya Roh Tae Wo di Korea Selatan dan jatuhnya Suharto, tidak memerlukan persekutuan seperti yang dikemukakan oleh Huntington. Tetapi kelas menengah yang revolusioner, terutama mahasiswa, dan mereka inilah yang terasing dari elite yang berkuasa dan yang paling sensitif terhadap ide-ide baru, menuntut pembaharuan

serta tidak sepenuhnya terkooptasi. Huntington juga kurang tepat ketika mengatakan bahwa kelas menengah merupakan motor revolusi. Tanpa mahasiswa kelas menengah di Asia tidak kritis terhadap kekuasaan. Kelas menengah di sini lahir dari rahim rejim bahkan dengan fasilitas kekuasaan, sehingga kecil kemungkinannya kritis terhadap kekuasaan. Robinson (1998) menulis tentang hal ini sebagai berikut:

“Kelompok-kelompok perusahaan baru itu juga bergantung pada kebijakan proteksi dan subsidi negara, dan pada perlindungan pusat kekuasaan birokrasi politik. Akhirnya, kapitalis dalam negeri sangat mengandalkan peranan negara untuk mendukung mereka dalam menghadapi modal asing. Karena itu, ada alasan untuk mengatakan bahwa kaum borjuis industri Indonesia tidak mungkin bisa diharapkan akan memainkan peranan penting dalam perubahan politik dan ekonomi”.

Kesimpulan yang sama tentang golongan professional dikemukakan oleh Liddle (1993):

“Saya menduga bahwa mayoritas kaum professional dan wiraswastawan tidak pada kenyataannya liberal melainkan memiliki kerelaan untuk memperdagangkan sejumlah ketergantungan untuk memperoleh saham lebih besar dari kucuran dana Negara. Kebanyakan kelompok lain sama bahagiannya untuk bekerja dalam sistem, kecuali minoritas muslim yang taat”.

Bagaimana dengan peranan kaum tani? Huntington mensyaratkan dukungan atau partisipasi mereka dalam revolusi. Tetapi Wertheim melihat dari aspek sosial dan ekonomi di mana ada kesengsaraan ekstrem dan tiadanya peluang mobilitas sosial vertikal dan horisontal dibarengi dengan sistem politik yang kejam. Pemikiran kedua ilmuwan tersebut gagal dalam menjelaskan situasi Asia Tenggara. Berbagai data kuantitatif memang menunjukkan adanya perbaikan kehidupan, tetapi disertai ketimpangan menyolok terutama antara petani penggarap dan pemilik tanah dan ketimpangan desa – kota. Artinya, masih ditemukan kemiskinan yang cukup besar di perdesaan terutama yang melanda petani penggarap. Jumlah golongan ini terus membesar dari tahun ke tahun dan tidak menunjukkan adanya revolusi petani (lihat tabel di bawah ini). Kemiskinan atau kemelaratan petani di perdesaan Jawa dijelaskan oleh Geertz sebagai kemiskinan yang terbagi (shared poverty), jauh membuat orang-orang menjadi revolusioner. Pada pertengahan tahun 1980-an ketika revolusi hijau berhasil meningkatkan produksi padi dan membongkar institusi-institusi lokal yang selama bertahun-tahun berfungsi sebagai penyangga harmoni sosial, juga tidak menghasilkan frustrasi massal yang akan mengarah kepada revolusi tani.

James C.Scott (2001) secara cerdas telah menjelaskan berbagai keresahan di kalangan petani dan tidak munculnya revolusi petani. Bagi Scott, perilaku petani itu rasional, dalam arti mampu memperhitungkan untung rugi dari tindakannya. Melakukan pemberontakan bagi Scott hanya menempatkan kaum tani menjadi ironis, yaitu menolong sekelompok penguasa merebut kekuasaan yang rencananya untuk industrialisasi, perpajakan dan kolektivisasi yang sangat berbeda dengan apa yang kaum tani bayangkan sebagai tujuannya. Pemberontakan hanya efektif bagi buruh pabrik yang lokasi pabriknya terbatas. Bagi kaum tani yang terpecah di beberapa perdesaan dan menghadapi rintangan yang lebih berat dari tindakan kolektif yang teratur, bentuk perlawanan sehari-hari lebih penting. Perlawanan senjata biasanya yang dimiliki kaum lemah itu berupa menghambat, pura-pura menurut, pura-pura tidak tahu, pembakaran dan sabotase. Tindakan itu dilakukan selain untuk menghindari konfrontasi langsung dengan elite yang lebih kuat, juga dinilai lebih bermanfaat. Tindakan kolektif terbuka lebih memiliki hambatan stratifikasi local, hubungan produksi dan sumber pendapatan alternatif. Selain itu, faktor-faktor seperti dampak perubahan yang menghancurkan hampir semua rutinitas kehidupan sehari-hari, jalinan hubungan social antara petani miskin dan petani kaya yang rumit yang tidak bisa dipilah oleh variabel-variabel ekonomi saja, tersedianya alternatif yang murah, yaitu melarikan diri dari komunitas perdesaan dan ketakutan akan penindasan yang lebih besar jika pemberontakan terbuka berlangsung, adalah pertimbangan rasional yang mendorong perlawanan sehari-hari jauh lebih efektif.

Dapat disimpulkan bahwa revolusi sosial atau terbatas pada revolusi borjuis dan revolusi petani, tidak memiliki penyebab tunggal. Berbagai penyebab saling melengkapi dan menumbuhkan suasana keresahan, kegelisahan yang diikuti oleh munculnya pemimpin yang kuat yang menawarkan ideologi alternatif. Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu kasus juga belum tentu akurat untuk kasus lainnya. Pendekatan psikologis dari Gurr yang menerangkan deprivasi relatif sebagai pendorong kekerasan kolektif, gagal menjelaskan revolusi sosial secara damai seperti yang terjadi di Filipina 1986. Dalam konsep Gurr, revolusi termasuk dalam internal war (perang saudara) yang mensyaratkan adanya kekuatan yang terorganisasi dan dilakukan dengan kekerasan. Teori Davies dan Brinton yang lebih bermuatan ekonomi, gagal menjelaskan tidak terjadinya revolusi di sejumlah Negara yang makmur dan tiba-tiba merosot perekonomiannya. Teori Huntington yang menekankan struktur politik dan persekutuan kelas menengah kota, kaum intelektual, petani dan borjuasi

kota, gagal menjelaskan perubahan sosial di beberapa Negara Dunia Ketiga pada akhir abad XX.

Melalui studi pustaka terhadap sejumlah kajian mengenai revolusi, Eisenstadt (1986) menyimpulkan lima citra sejati revolusi. Pertama, perubahan dengan kekerasan terhadap rejim politik yang ada. Kekerasan ini merupakan tindakan yang tidak terhindarkan karena pihak penguasa tidak mungkin secara sukarela menyerahkan kekuasaannya. Lagi pula, simbol-simbol revolusi mendapatkan legitimasi melalui kekerasan tersebut. Kedua, pergantian elite politik atau kelas yang sedang berkuasa dengan yang lainnya. Kelompok yang melancarkan revolusi, belum tentu mengambil alih kendali pemerintahan. Sering terjadi kelompok ketiga yang memiliki posisi strategis lebih mungkin mengambil alih pemerintahan. Dalam revolusi petani, di mana kepemimpinan berasal dari intelektual kota, maka kaum tani hanya menghantarkan intelektual kota untuk berkuasa. Ketiga, perubahan secara mendasar seluruh bidang kelembagaan utama. Struktur sosial lama dengan aturan kerja lama, harus dibongkar untuk memungkinkan bekerjanya ideologi baru. Keempat, pemutusan secara radikal dengan segala hal yang telah lampau. Tindakan ini dilakukan untuk menjamin kontinuitas perubahan, seperti pembaharuan ekonomi, menjamin program kerja rejim baru dan sebagainya. Kelima, memberikan kekuatan ideologis dan orientasi kebangkitan yang telah lampau mengenai gagasan revolusioner.

Meskipun demikian, Eisenstadt mencatat bahwa “hampir semua pendekatan tersebut gagal dalam membedakan antara kondisi yang menyebabkan ketidakpuasan umum, aksi kekerasan kolektif yang berbeda-beda, penggulingan rejim dan atau revolusi yang akan mengakibatkan perubahan-perubahan sosial yang meluas”. Jadi studi-studi yang melihat revolusi atau gerakan-gerakan sosial yang menggiring mereka ke arah revolusi atau sebaliknya. Selain itu, mereka kurang memperlihatkan kondisi-kondisi yang dapat membawa gerakan sosial ke arah yang revolusioner atau bilamana gerakan sosial menjadi revolusi. Sebab itu, Eisenstadt mengkaji revolusi dengan menggunakan pendekatan perbandingan mengenai revolusi dan transformasi sosial, sehingga bisa menutup kelemahan tersebut. Untuk memenuhi tujuannya itu, ia membedakan protes, pemberontakan, pembangkangan dan revolusi. Dengan membahas konsep-konsep tersebut, ia juga berusaha mengenali unsur-unsur revolusi modern yang membedakannya baik secara ideologi maupun kelembagaan dengan gerakan protes, pemberontakan dan perjuangan politik.

Konsep Skocpol (1991) tentang revolusi tidak berbeda dengan Gurr dan Davies. Menurut Skocpol, revolusi adalah perubahan yang cepat dan mendasar dari masyarakat dan struktur kelas suatu Negara dan revolusi tersebut dibarengi serta sebagian menyebabkan pemberontakan kelas bawah. Bedanya, Skocpol menekankan aspek penting perubahan struktur kelas di suatu Negara dan pemberontakan kelas bawah. Konsep itu sangat Marxian baik pendekatan kelas maupun konflik politiknya. Ciri-ciri itu memang melekat pada revolusi Perancis, Rusia dan China yang telah melegenda dan yang menjadi fokus kajian Skocpol. Tetapi sulit untuk diterapkan pada kasus di luar wilayah tersebut. Konsep tersebut membawa pada pendekatan dan metode analisis yang berbeda dengan para pendahulunya. Para pendahulunya menggunakan perspektif Marxis, agregat psikologis, teori sistem dan teori konflik politik. Pendekatan-pendekatan hanya memperhatikan aspek internal suatu perubahan kelas sosial.

Sebuah pendekatan yang memadai untuk menjelaskan revolusi menurut Skocpol hanyalah pendekatan struktural dan konflik kelas. Dengan pendekatan ini, penulis akan dapat menunjukkan perubahan fundamental dan pemberontakan kelas bawah seperti yang dikandung dalam konsep revolusi. Kelemahan lain dari empat pendekatan sebelumnya terletak pada pengabaian dimensi internasional dalam perubahan sosial dan Negara sebagai unit analisis. Suatu perspektif struktural, menurut Skocpol berarti suatu fokus terhadap hubungan, maka harus mencakup hubungan antar kelompok dan hubungan transnasional. "Hubungan telah turut berperan atas timbulnya semua krisis revolusioner dengan segala akibatnya". Semua krisis sosial yang mendorong revolusi modern tidak bisa dipisahkan dari perkembangan kapitalisme internasional dan pembentukan Negara bangsa. Hal tersebut secara nyata ditunjukkan oleh berkembangnya modernisasi ke seluruh penjuru dunia. Modernisasi berarti industrialisasi, pembangunan ekonomi dan internasionalisasi kapital baik ekonomi maupun militer. Perkembangan modernisasi yang demikian itu telah melemahkan peranan Negara dan kontrol Negara, sehingga membuka jalan bagi konflik mendasar dan transformasi struktural. Dengan argumen itu, Skocpol menyatakan "tidak ada perspektif teoritis tentang revolusi yang sah yang sanggup menyingkirkan konteks internasional dan sejarah dunia wahana terjadinya revolusi tersebut".

Teori Charles Tilly (1978) berangkat dari pendekatan konflik politik yang telah lama dikenal dalam studi revolusi. Bukan persoalan frustrasi agresi, kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membangkitkan revolusi, tetapi konflik-konflik politik yang inheren dalam masyarakat. Menurutnya, revolusi adalah kasus khusus dari aksi kolektif di mana kelompok-

kelompok yang bersaing, berjuang untuk mendapatkan kekuasaan politik tertinggi atas masyarakat dan kasus di mana kelompok-kelompok penentang berhasil sekurang-kurangnya dalam beberapa hal tertentu menggantikan para pemegang kekuasaan yang ada. Sebagai rangkaian dari konflik politik yang panjang, revolusi tidak harus disertai perubahan fundamental dan kekerasan. Penyingkiran sama sekali kekuatan lama dari arena kekuasaan dan digantikan oleh kekuasaan yang baru, belum pernah terjadi dalam revolusi manapun. Demikian pula dengan insiden kekerasan kolektif yang selalu dilabelkan dalam konsep revolusi. Bagi Tilly, hal itu sebenarnya hanya merupakan akibat dari proses normal persaingan kelompok untuk memperebutkan kekuasaan. Di sini teori Tilly menolak konflik material Marxian dan pembongkaran struktur lama dan penyingkiran para aktornya seperti yang dikehendaki oleh Skocpol dan Eisentadt. Tilly, dalam hal ini mengembangkan teori aksi kolektif dengan penekanan pada kelompok dan organisasinya dalam menggerakkan sumberdaya untuk meraih kekuasaan tertinggi dalam masyarakat. Jadi, berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang hanya menempatkan perilaku kolektif sebagai reaksi. Hal ini terlihat dalam teori Davies, Gurr, Huntington dan Skocpol. Tilly secara tegas mengatakan bahwa revolusi merupakan bentuk aksi kolektif yang bertujuan jelas. Disinilah ia sejalan dengan Marx tentang pentingnya organisasi membangun kesadaran kelas dan menggerakkannya untuk mengambil alih kekuasaan kapital.

Seperti telah disinggung di depan, teori perubahan sosial Wertheim diarahkan untuk membangun masyarakat dinamis. Revolusi maupun evolusi baginya adalah sama, yang membedakan hanyalah kecenderungan sungguh-sungguh pada perubahan fundamental dari susunan masyarakat yang berlaku. Dari pengamatannya, ia melihat bahwa revolusi besar maupun kecil merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan suatu pengecualian. Revolusi sudah menjadi fakta sosial dengan banyaknya negara di dunia yang dilanda revolusi. Meskipun demikian, ia tidak menemukan prinsip-prinsip obyektif revolusi seperti yang dibangun oleh Brinton, sebab sekali prinsip berhasil ditemukan, muncul pertanyaan baru dan begitu seterusnya. Dengan menggunakan metode sosio-historis, Wertheim melihat bahwa revolusi adalah jalan evolusi yang dipercepat dan keberhasilannya bukan diukur dari perubahan fundamental, melainkan seberapa jauh membawa emansipasi bagi masyarakat luas. Kata kunci untuk memahami teori perubahan sosial Wertheim adalah emansipasi. Emansipasi bukanlah sesuatu pemberian dari atas, tetapi suatu usaha kolektif dari suatu kelompok yang berada di pinggiran atau terpinggirkan oleh sistem sosial dominan untuk ikut serta dalam sistem atau menuju hirarki sosial yang lebih tinggi. Dengan konsep ini, ia

menolak teori perubahan sosial bertahap seperti dalam Marxisme ortodoks, pertumbuhan masyarakat dari Rostow, tradisional ke modern dari Lenner, maupun masyarakat kesukuan ke birokrasi modern dari Redcliffe-Brown. Tetapi ia menggunakan dialektika Hegel, khususnya untuk menjelaskan gerak masyarakat. Perubahan sosial atau gerak masyarakat tidak berlangsung satu arah, akan tetapi timbal balik. Perjuangan sosial dapat dilakukan oleh setiap kelompok untuk membebaskan belenggu dari kelompok lain, hal ini mempunyai makna emansipasi. Dengan demikian teori perubahan sosial dinamik dari Wertheim telah menyelesaikan persoalan dikotomis evolusi-revolusi dan dapat diterapkan untuk semua jenis gerakan sosial, baik dengan kekerasan, perubahan fundamental atau sekedar huru-hara.

Terima Kasih

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI